

Sistem Penjamin Mutu Internal dan Eksternal pada Lembaga Pendidikan Dasar

Noly Handayani, Usman Radiana, Tulus Junanto, Iswan Efendi

ABSTRACT

This study aims to describe two main things in the quality assurance system in basic education institutions, namely internal quality assurance and external quality assurance. As well as the purpose of quality assurance at the basic education level. This study uses a qualitative approach to the type of library research. Data will be collected through books, journals, and articles. The data will be analyzed by content analysis. Based on the results of the study, it was found that internal quality assurance in the form of: 1) policies and procedures for quality assurance; 2) approval, monitoring and periodic review of programs and awards; 3) student assessment, 4) quality assurance of teaching staff/lecturers; 5) learning resources and student support; 6) information systems; 7) public information. External quality assurance in the form of: 1) procedures; 2) process development; 3) criteria for decisions; 4) the process is in accordance with the objectives; 5) reporting; 6) follow-up procedures; 7) periodic review of implementation; and 8) analysis of the whole system. As well as the purpose of guaranteeing the quality of basic education is to control the implementation of education by education units in basic education and secondary education so that quality education is realized.

Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Submitted 15 Oktober 2022
Revised 21 Oktober 2022
Accepted 22 Oktober 2022

KEYWORDS

Internal & external quality assurance system, basic education institute

CITATION (APA 6th Edition)

Noly Handayani, Usman Radiana, Tulus Junanto, Iswan Efendi. (2022). Sistem Penjamin Mutu Internal dan Eksternal pada Lembaga Pendidikan Dasar. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*. 1(2), page: 71 – 76

***CORRESPONDANCE AUTHOR**nolyhandayanianjungan@gmail.comusmanradiana@gmail.comtulus.junanto@fkip.untan.ac.idiswanefendi323@gmail.com**PENDAHULUAN**

Lembaga pendidikan berperan sebagai dasar pencipta dan pembentuk generasi yang berkualitas secara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Generasi berkualitas tersebut kedepannya diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Pendidikan sebagai lembaga yang dinamis perlu selalu melakukan perubahan guna membenahi tujuan pendidikan itu sendiri. Masa kini, hal yang paling krusial dalam dunia pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan diberbagai jenis maupun jenjang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan

Mutu pendidikan adalah hal penting yang akan menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan, ketika banyak hasil lulusan sekolah dasar yang tidak bermutu maka ini adalah masalah dalam sistem penjamin mutu pendidikan dasar. Satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah adalah desentralisasi sekolah. Desentralisasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengelolaan sekolah di tingkat daerah. Sekolah mendapat peluang untuk berkembang dan mengatur proses pendidikan sesuai dengan potensi lingkungan yang ada

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta pengambilan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Douglas D Danfort mutu adalah senjata yang paling ampuh untuk memperkuat posisi persaingan di pasar dunia (Umam, 2014, hlm. 281). Peneliti menyimpulkan bahwa kualitas adalah kekayaan intelektual yang berlaku dimanapun. Hal ini akan terwujud melalui mutu pendidikan yang terbaik. Sistem penjamin mutu internal dan eksternal adalah bentuk penjamin mutu pendidikan. Haapakorpi menyatakan struktur dan manajemen organisasi, budaya dan disiplin individu memberikan pengaruh terhadap hasil penjaminan mutu (Haapakorpi, 2011). Penjamin mutu internal berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Terlaksananya penjamin mutu yang efisien akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sebagai panduan kebijakan dalam penjaminan mutu internal dan eksternal guna pencapaian mutu lembaga pendidikan dasar yang baik.

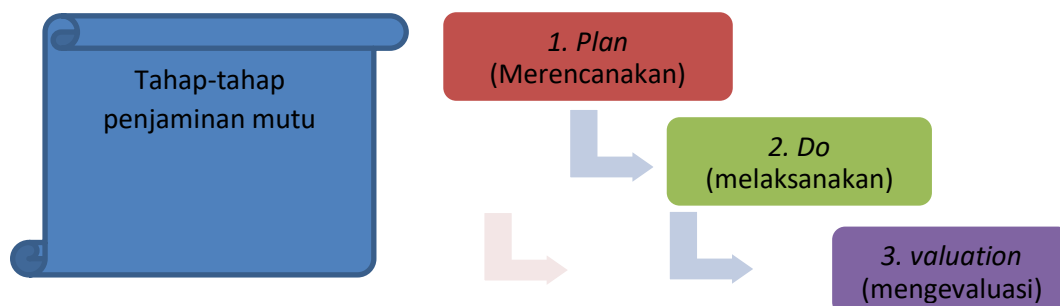
PEMBAHASAN

A. Penjaminan Mutu Internal

Gaspersz (2011:10) menjelaskan bahwa penjaminan mutu (quality assurance) yaitu semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberi kepercayaan yang cukup bahwa produk layanan akan memuaskan kebutuhan untuk mutu tertentu. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Hendrowati, 2016). Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa penjamin mutu pendidikan berhubungan dengan tindakan yang terencana dan terarah untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

Penjamin mutu internal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dengan pemetaan mutu sekolah. Pemetaan dilakukan secara nasional menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi tersebut bernama Rapor Penjaminan Mutu Pendidikan atau lebih populer dengan sebutan Rapor PMP. Data yang terdapat di dalam Rapor PMP akan digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai bahan evaluasi sekolah. Hasil penelitian baru-baru ini memperlihatkan bahwa ada tren yang kuat disebabkan oleh diberlakukannya sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi di Eropa terhadap penguatan mutu pendidikan. "Audit mutu" atau "audit kelembagaan" adalah sistem dan kebijakan yang paling banyak digunakan sebagai instrumen penjaminan mutu. Kajian ini juga menemukan bahwa refleksi terhadap peningkatan kualitas yang dihasilkan dari dalam lembaga (internal) adalah hal yang paling penting dicapai daripada dorongan lembaga eksternal (Corengia, et al., 2014).

Implementasi penjaminan mutu internal, penentuan program dan pelaksanaan seperti dikemukakan oleh Uchtiawati, dan Zawawi (2014) bahwa Sekolah melalui mekanisme yang telah ditentukan dapat menentukan tahap-tahap pelaksanaan jaminan mutu sebagai berikut: yaitu: *plan* (merencanakan), *do* (melaksanakan), dan melakukan tahap *evaluation* (mengevaluasi), secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan dukungan *adequate facilities and equitable educators will have a significant impact on the implementation of the internal quality assurance system in schools* (Darman, Darwin, dan Yusnadi, 2017).



Gambar 1: Tahap-tahap pelaksanaan jaminan Mutu

Al-Alawi et al., (2009) menemukan mekanisme penjaminan mutu internal, yaitu: 1) membentuk komite penjaminan mutu, seperti Lembaga Penjaminan Mutu; 2) mengundang konsultan penjaminan mutu; 3) menilai umpan balik; 4) mengembangkan software untuk pengarsipan dokumen jaminan mutu; 5) menetapkan sistem

pengarsipan untuk dokumentasi penjaminan mutu; 6) mempersiapkan templet untuk spesifikasi program, spesifikasi mata kuliah, dan ujian akhir. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Eropa membuat standar dan pedoman dalam upaya penjaminan mutu internal. Lembaga pendidikan akan dikatakan memiliki mutu jika telah bahkan melampaui standar dan pedoman tersebut. Standar dan pedoman ini merupakan satu kesatuan yang harus mampu dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan tinggi Eropa. Untuk lebih jelaskan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur untuk penjaminan mutu. Langkah awal sebuah lembaga pendidikan dalam upaya penjaminan mutu adalah membuat kebijakan dan prosedur langkah-langkah penjaminan mutu yang bertujuan untuk meningkatkan mutu. Kebijakan harus mampu menciptakan budaya mutu dan kebijakan harus bersifat berkelanjutan/ terus menerus. Dalam hal ini penting bagi lembaga melibatkan seluruh stakeholdernya.
2. Persetujuan, pemantauan dan tinjauan berkala atas program dan penghargaan. Hal ini bertujuan agar lembaga memiliki mekanisme secara formal (SOP) adalah upaya pembuatan program-program di lembaganya serta cara memberikan reward atas keberhasilan program-program tersebut.
3. Penilaian mahasiswa. Proses evaluasi peserta didik harus dilakukan dengan transparan, artinya peserta didik harus diberitahu sebelumnya tentang kriteria, peraturan, dan prosedur yang akan menjadi bahan penilaian.
4. Penjaminan mutu tenaga pendidik. Tenaga pendidikan merupakan faktor utama dalam lembaga pendidikan, oleh karena itu lembaga pendidikan harus mampu menerapkan manajemen SDM yang berkelanjutan untuk upaya pengembangan-pengembangan tenaga pendidik. Memberikan motivasi dengan berbagai cara seperti kompensasi yang memadai, pembinaan dan lain sebagainya.
5. Sumber belajar dan dukungan siswa. Sumber belajar harus benar-benar dipastikan ketersediannya sebagai komitmen lembaga untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi lulusan. Setiap program-program yang ditawarkan harus terlebih dahulu dipersiapkan ketersediaan sumber belajarnya.
6. Sistem informasi. Penting bagi lembaga pendidikan untuk membuat sistem informasi sebagai alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menggunakan informasi untuk pengelolaan program studi dan kegiatan lainnya yang efektif.
7. Informasi publik. Memberikan informasi yang sesuai dan relevan kepada publik tentang program yang dimiliki dan ditawarkan merupakan tanggungjawab dan kewajiban lembaga pendidikan (ENQA, 2009).

Menurut Puspitasari (2018) kualitas atau mutu dalam pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung kepada kualitas perencanaan, kegiatan pelaksanaan, evaluasi atau penilaian dan program pengawasan. Kerja tim adalah faktor penting bagi sekolah untuk meningkatkan efektivitas operasional penjaminan kualitas internal (Praraksa et al., 2015). Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan oleh para ahli, penjaminan mutu perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu lembaga pendidikan dalam pelaksanaannya. Penjaminan mutu internal harus dilaksanakan secara konsisten demi mewujudkan lembaga pendidikan dasar yang mencapai budaya mutu.

B. Penjamin Mutu Eksternal

Cheung & Tsui (2010) mendefinisikan penjaminan mutu eksternal sebagai *a process of sharing experience and benchmarking against best practices*. Penjaminan mutu eksternal merupakan sebuah rangkaian proses berbagi pengalaman dan benchmark terhadap praktik pendidikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk membantu, membuat rekomendasi, dan memberikan saran untuk mendapatkan keunggulan, relevansi, dan keragaman. Demi kelancaran prosedur, akuntabilitas dan integritas lembaga penjamin mutu eksternal, maka orang-orang yang akan melakukan prosesnya (asesor) harus memiliki kompetensi. Cheung (2015) menjabarkan kompetensi penting yang harus dimiliki praktisi penjaminan mutu eksternal. Kompetensi tersebut antara lain: memiliki profesional, mampu memeriksa dengan sistematis, mampu menganalisis situasi, kemampuan manajemen, reflektif, dan memiliki kompetensi interpersonal.



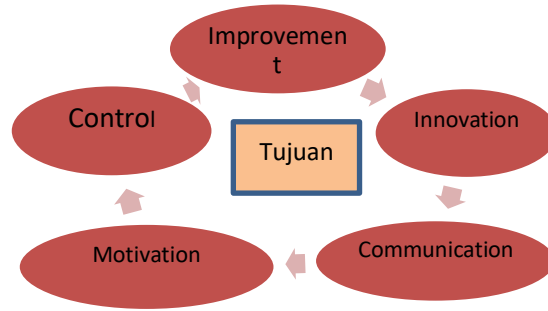
Gambar 2: Kompetensi praktisi jaminan Mutu

Selain penjaminan mutu internal, pendidikan tinggi Eropa juga membuat 8 (delapan) standar dalam penjaminan kualitas eksternal. Kedelapan standar ini harus dipenuhi oleh pendidikan tinggi secara keseluruhan dan terintegrasi pada tiap standarnya. Untuk lebih jelas tentang masing-masing standar dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, penggunaan prosedur penjaminan kualitas internal. Penjaminan mutu eksternal juga melihat dan mempertimbangkan proses penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh internal lembaga. Untuk itu perlu sinergisitas antara penjaminan mutu internal dengan eksternal. Kedua, pengembangan proses penjaminan mutu eksternal. Proses penjaminan mutu eksternal harus mengembangkan prosedur yang akan dilaksanakan kemudian mempublikasikannya/ memberikan informasi kepada lembaga pendidikan. Proses pengembangan prosedur (termasuk instrumen) baiknya melibatkan lembaga pendidikan. Ketiga, kriteria untuk keputusan. Maksudnya kriteria-kriteria yang akan menjadi bahan keputusan hasil akreditasi eksternal nantinya harus diberikan informasinya kepada lembaga pendidikan. Kriteria ini juga harus diimplementasikan secara konsisten. Keempat, Proses sesuai dengan tujuan.

Penjaminan mutu eksternal juga harus sesuai dengan tujuan. Setiap proses didesain untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan mutu pendidikan. Kelima, pelaporan. Pemberian laporan harus bersifat sederhana mungkin agar mudah difahami. Seluruh hasil penjaminan mutu eksternal baik itu rekomendasi, pujian dan lain sebagainya harus ditampilkan untuk bahan evaluasi. Keenam, prosedur tindak lanjut. Penjaminan mutu yang bersifat rekomendasi untuk tindakan perbaikan, harus memiliki prosedur tindak lanjut yang telah ditentukan yang dilaksanakan secara konsisten. Ketujuh, tinjauan berkala. Proses penjaminan mutu eksternal baik untuk institusi maupun program studi harus dilaksanakan secara berkala. Kedelapan, analisis seluruh sistem: Lembaga penjaminan mutu eksternal harus menghasilkan ringkasan laporan yang menggambarkan dan menganalisis temuan umum dari analisis data, evaluasi, penilaian, dan lainnya (ENQA, 2009). Proses penjaminan mutu eksternal harus mengembangkan prosedur yang akan dilaksanakan kemudian mempublikasikannya atau memberikan informasi kepada lembaga pendidikan. Penjaminan mutu eksternal juga akan melihat penjaminan mutu internal dalam sebuah lembaga pendidikan.

C. Kontribusi Penjaminan Mutu terhadap Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu merupakan topik bahasan yang selalu dibahas dalam berbagai kesempatan diskusi dalam lembaga pendidikan. Peningkatan mutu dianggap dapat mempengaruhi kualitas hasil lulusan suatu lembaga. Lembaga pendidikan dituntut untuk terus memperbaiki diri dengan melakukan inovasi dan terobosan baru guna meningkatkan mutu pendidikan. Dalam jenjang sekolah dasar, mutu pendidikan diharapkan benar-benar mencetak generasi berkualitas yang siap melanjutkan ke jenjang menengah. Jenjang menengah yang dimaksud dapat berupa Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau sekolah-sekolah lain sesuai minat peserta didik. Goetsch & Davis (2014) menjelaskan mutu adalah keadaan dinamis yang terkait dengan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan dan membantu menghasilkan keunggulan. Peneliti menyimpulkan bahwa suatu lembaga dikatakan bermutu jika dapat berubah memperbaiki semua hal yang terlibat di dalam suatu lembaga, misalnya sistem pendidikan, sarana dan prasarana, guru, peserta didik, serta perangkat sekolah dasar dalam penelitian ini.



Gambar 3: Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan

Terdapat lima tujuan untuk penjaminan mutu pada lembaga pendidikan, yaitu: *improvement*, *innovation*, *communication*, *motivation* and *control* (Rosa, 2014). Kelima acuan ini dapat menjadi acuan dalam penjaminan mutu pendidikan dasar. Untuk lebih jelas tentang masing-masing tujuan tersebut, maka diuraikan sebagai berikut:

Improvement: Tujuan yang pertama dari penjaminan mutu adalah untuk peningkatan lembaga pendidikan. Tujuan ini mencerminkan bahwa penjaminan mutu menjadi salah satu cara agar lembaga pendidikan mengalami peningkatan dan perkembangan. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu harus mengarah pada upaya-upaya peningkatan mutu khususnya pada bidang-bidang akademik atau yang berkenaan langsung dengan proses pembelajaran.

Innovation: Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai bahan berinovasi. Inovasi berbeda dengan perbaikan. Inovasi bertujuan mencari sesuatu atau menemukan hal baru. Penjaminan mutu berperan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam lembaga pendidikan, karena mutu yang baik harus terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Perbaikan proses dan metodologi pembelajaran, sistem informasi, manajemen serta penelitian harus terus dilakukan guna menjadi lebih baik dan up to date.

Communication: Selanjutnya tujuan penjaminan mutu adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi disini maksudnya sebagai pemberi informasi kepada para civitas akademika tentang apa yang sudah ada dan hal apa yang perlu ditingkatkan. Selain itu tujuan ini untuk memberikan informasi kepada publik dan stakeholder lainnya tentang capaian yang diraih oleh lembaga pendidikan.

Motivation: Tujuan motivasi berkaitan dengan sikap dan perilaku civitas dalam menghadapi dan menanggapi hasil penjaminan mutu. Civitas akademik akan terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan melihat hasil dari penjaminan mutu. Jika hasil penjaminan mutu belum menunjukkan hasil yang maksimal maka civitas akan terdorong untuk melakukan perbaikan. Jika hasil sudah menunjukkan kesempurnaan/ baik, mereka akan termotivasi untuk terus mempertahankannya dengan melakukan praktik-praktik yang baik.

Control: Tujuan yang terakhir adalah kontrol/ pengawasan. Pelaksanaan penjaminan mutu akan memberikan umpan balik dari hasil pemeriksaan/ asesmennya kepada lembaga pendidikan. Hasil ini akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan kemudian melakukan perbaikan. Pengawasan akan dilakukan dan dipraktikkan yang bertujuan mengantisipasi hasil rekomendasi dari penjaminan mutu. Pengelola akan melakukan kontrol agar rekomendasi yang baik tetap dipertahankan dan dikembangkan sedangkan rekomendasi perbaikan dipastikan tidak akan terjadi kembali. Selanjutnya untuk mempertahankan penjaminan mutu diperlukan konsep yang benar-benar dapat diterima oleh semua kalangan.

SIMPULAN

Pendidikan dasar merupakan fondasi peserta didik untuk kehidupan yang akan datang. Peadaban zaman yang semakin maju menuntut pendidikan dasar untuk terus melakukan perbaikan mutu pendidikan guna mewujudkan kualitas lulusan yang terbaik. Pendidikan dikatakan bermutu jika mampu memenuhi dan menjalankan sesuai standar pendidikan yang berlaku, memiliki Rapot PMP yang terbaik. Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu maka lembaga pendidikan perlu melakukan proses-proses penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Proses tersebut menjadi bahan evaluasi tentang apa yang belum dicapai dan yang harus pertahankan. Lembaga pendidikan perlu bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk dapat memberikan hasil terbaik. Sulaiman dan Wibowo (2016) menyatakan cita-cita, harapan akan mutu sebuah lulusan membutuhkan sebuah sistem penjaminan mutu agar mutu lulusan dapat ditingkatkan diupayakan berkelanjutan. Jika belum diperoleh peningkatan mutu sesuai yang diharapkan, kepala sekolah dan tim penjaminan mutu sekolah perlu melakukan refleksi dan mengidentifikasi penyebab keadaan tersebut. Analisis kualitatif perlu dilakukan secara lebih mendalam untuk memperbaiki program dan kegiatan pada semester selanjutnya (Sani dkk., 2018, hlm. 38).

REFERENSI

- Al-Alawi, Y., Al-Kaabi, D., Rashdan, S., & Al-Khaleefa, L. (2009). Quality Assurance and Continuous Improvement: A Case Study of The University of Bahrain. *Quality in Higher Education*, 15(1), 61–69. <https://doi.org/10.1080/13538320902731575>.
- Bernhard, A. (2012). *Quality Assurance in an International Higher Education Area*. Wiesbaden: VS Verlag für
- Cheung, J. C. M. (2015). Professionalism, Profession and Quality Assurance Practitioners in External Quality Assurance Agencies in Higher Education. *Quality in Higher Education*, 21(2), 151–170. <https://doi.org/10.1080/13538322.2015.1051795>.
- Cheung, P. P. T., & Tsui, C. B. S. (2010). Quality Assurance for All. *Quality in Higher Education*, 16(2), 169–171. <https://doi.org/10.1080/13538322.2010.485723>.
- Corengia, Á., Del Bello, J. C., Pita Carranza, M., & Adrogué, C. (2014). Quality Assurance Systems of Higher Education - The Case of European Institutions: Origin, Evolution and Trends. *Revista Gestao Universitaria Na America Latina - GUAL*, 7(3), 61–76.
- Darman, Darwin, dan Yusnadi. 2017. Implication of Internal Quality Assurance System of Schools Implementation Against the Accreditation rating of State Senior High Schools of Natuna, Riau Island Province. *Journal of Research & Method in Education Volume 7, Issue 5* 36-39.
- David L. Goetsch dan Stanley Davis. (2014). *Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production (pearson ne)*. Edinburgh: Pearson.
- Enqa (ed.). (2009). *tandards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (3rd Ed)*. Helsinki: European Association for Quality Assurance in Higher Education.
- Gaspersz, Vincent, (2002). *Pedoman Implementasi Program Six Sigma*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haapakorpi, A. (2011). Quality Assurance Processes in Finnish Universities: Direct and Indirect Outcomes and Organisational Conditions. *Quality in Higher Education*, 17(1), 69–81. <https://doi.org/10.1080/13538322.2011.554311>.
- Hendrowati, T. Y. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Sekolah pada SMPN 25 Bandar Lampung. *Jurnal E-DuMath*, 2(3). Diambil dari <https://ejournal.stkipmpringsewulpg.ac.id/index.php/edumath/article/download/189/132>.
- Rosa, M. J. (2014). The Academic Constituency. In M. J. Rosa & A. Amaral (Eds.). *Quality Assurance in Higher Education: Contemporary Debates (pp. 181–206)*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Praraksa, P., Sroinam, S., Inthusamith, M., & Pawarinyanon, M. (2015). Model of Factors Influencing Internal Quality Assurance Operational Effectiveness of the Small Sized Primary Schools in Northeast Thailand. *Social and Behavioral Sciences*, 197: 1586-1590.
- Puspitasari, H. (2018). Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem penjaminan Mutu Internal di Sekolah. *Muslim Heritage*, 1: 339-368.
- Sani, R. A., Arifin, R. S., Rif'an, M., & Triatna, C. (2018). *Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Tangerang: Tiara Smart.
- Sulaiman, A., & Wibowo, U.B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. 4: 17-32.
- Umam, K. (2014). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Pustaka Setia.